



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI





LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR



Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Direktorat Perundingan Bilateral Menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) yang menguraikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja Direktur Perundingan Bilateral Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Perundingan Bilateral disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 10 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Direktorat Perundingan Bilateral selama Tahun 2024 sehingga dapat menjadi pedoman monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024 dapat selesai tepat pada waktunya

Jakarta, 30 Desember 2024
Direktur Perundingan Bilateral



Johni Martha

RINGKASAN EKSEKUTIF

11 PERUNDINGAN BILATERAL

Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral selama tahun 2024 sebanyak 11 perundingan yaitu: Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Jordan PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-EAEU FTA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Srilanka PTA, Indonesia-GCC FTA, JCM Indonesia-UAE CEPA dan Committee on TIG Indonesia-Australia CEPA.

100% PELIMPAHAN DOKUMEN RATIFIKASI

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani tercapai 100% dengan selesainya proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Malaysia BTA dan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

85,50% PEMAHAMAN STAKEHOLDER

Presentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral tercapai sebesar 85,50% yang diperoleh melalui survei pemahaman pemangku kepentingan pada kegiatan konsultasi publik.

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Jenderal PPI memberikan mandat melalui perjanjian kinerja kepada Direktur Perundingan Bilateral. Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral. Pada tahun 2024, dalam perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ditetapkan 2 (dua) sasaran kinerja dan 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi yaitu jumlah perundingan perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral, presentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani, serta presentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil					
1	Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	JumlahNegosiasi(perundingan)	7	11	157,1	
B	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
1	Penyelesaian pelimpahandokumen ratifikasi perjanjianperdagangan bilateral keinstansi yang menangani	Persen	100	100	100	
2	Persentase pemahamanpemangku kepentingan terkaithasil perundinganperdagangan bilateral	Persen	85	85,50	100,58	
Rata-rata capaian tahun 2024					119,22	
Rata-rata capaian tahun 2023					133,39	

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6

BAB I

PENDAHULUAN.....	7
TUJUAN.....	8
STRUKTUR ORGANISASI.....	9
TUGAS DAN FUNGSI.....	10
PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.....	12
RENCANA KERJA.....	14
PERJANJIAN KINERJA.....	15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
KINERJA ANGGARAN.....	33

BAB IV

PENUTUP.....	33
REKOMENDASI.....	33

TABEL 1. REALISASI CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL TAHUN 2024.....	3
TABEL 2. KEGIATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL.....	15
TABEL 3. REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA I TAHUN 2024.....	18
TABEL 4. KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL 2024.....	32

Gambar 1 : Struktur Organisasi DPB tahun 2024.....	9
Gambar 2 : Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024.....	16
Gambar 3 : Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024.....	17
Gambar 4 : Perundingan Indonesia-Tunisia.....	19
Gambar 5 : Indonesia - Bangladesh Preferential Trade Agreement.....	20
Gambar 6 : Perundingan ke 10 Indonesia - Canada CEPA.....	21
Gambar 7 : Opening Plennary Indonesia - Canada CEPA.....	21
Gambar 8 : Perundingan Indonesia - Peru CEPA.....	22
Gambar 9 : Perundingan Indonesia - (IEU - CEPA).....	23
Gambar10 : Putaran ke-5 EAEU Free Trade Agreement (IEAEU-FTA).....	24
Gambar11 : Perundingan Indonesia - Srilanka PTA.....	25
Gambar12 : Peluncuran Perundingan Indonesia - GCC.....	26
Gambar13 : Perundingan Putaran pertama Indonesia - GCC FTA.....	26
Gambar14 : Committee on TIG Indonesia.....	27
Gambar15 : Joint Comittee Meeting (JCM) Indonesia - UAE CEPA.....	27
Gambar16 : Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA.....	28
Gambar17 : FGD pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral sektor Kelapa Sawit.....	29
Gambar18 : FGD pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral sektor Kertas danPulp.....	30
Gambar19 : Konsultasi Publik pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral.....	31


BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP berupa penghitungan tingkat kemajuan (*progress*) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja).

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015. Surat keputusan ini mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat unit kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja dan melampirkan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja. Pengukuran Kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward* dan *punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.



Sesuai dengan yang tertuang dalam permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral.

Capaian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan hasil realisasi yang dicapai dengan target ditetapkan di awal tahun 2024 di dalam kontrak perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral. Pada tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi serta menjadi dalam penyusunan program kerja dan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar di forum perundingan bilateral, Indonesia telah memperkuat perannya yang berorientasi pada penajakan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Agreement* (PTA), terutama dengan negara non tradisional.

Perundingan perdagangan bilateral yang telah disepakati dan diimplementasikan diharapkan dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha, untuk itu Direktorat Perundingan Bilateral juga melakukan konsultasi publik bersama pelaku usaha untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang hasil-hasil perjanjian perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra, yang pada akhirnya hasil perjanjian tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi pelaku usaha dan perkembangan perekonomian Indonesia.

TUJUAN

Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Oleh karena itu, pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut dalam satu tahun anggaran.



STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perundingan Bilateral

Struktur organisasi Direktorat Perundingan Bilateral terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Permendag Nomor 29 tahun 2022 Pasal 170 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Bilateral.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah Direktur Perundingan Bilateral dengan 7 (tujuh) Tim Kerja yang terdiri dari: Tim Afrika dan Timur Tengah, Tim Eropa, Tim Asia Selatan, Tengah dan Timur, Tim Amerika, Tim Asia Tenggara dan Pasifik, Tim Implementasi, dan Tim Pengembangan SDM.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permendag Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Bilateral dalam melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral, dengan fungsi:


1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
2. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang

kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;

1. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika, dan timur tengah;
2. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

PERAN STRATEGIS ORGANISASI


Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan mempunyai peran strategis untuk meningkatkan ekspor nasional. Upaya peningkatan ekspor di pasar global adalah melalui penguatan diplomasi perdagangan untuk peningkatan daya saing, penguatan pengembangan produk dan pasar ekspor, sistem informasi yang terintegrasi, ekspansi pasar global melalui sektor niaga, substitusi impor bahan baku, dan penguatan regulasi di sektor perdagangan untuk merespon isu perdagangan hijau dan berkelanjutan. Hal ini menjadi fokus Kementerian Perdagangan dalam penyusunan program kerja dan anggaran. Indonesia terus melakukan peran aktif dalam perundingan perdagangan internasional dengan negara mitra dagang memperjuangkan akses produk agar tetap diterima di pasar internasional.



Hal ini akan membantu perdagangan Indonesia yang sedang berkembang. Apabila jumlah ekspor meningkat, maka cadangan devisa Indonesia akan tetap berada di level yang baik. Perekonomian dunia saat ini berkembang sangat cepat dan Indonesia sebagai negara yang besar harus siap untuk menghadapi persaingan perdagangan dunia yang ketat dengan negara lain. Untuk itu, penting bagi Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing salah satunya melalui perundingan dagang dan forum kerja sama bilateral dengan negara mitra dagang. diharapkan dengan adanya CEPA, FTA maupun PTA dengan negara mitra dagang dapat membuka akses pasar barang Indonesia yang luas di luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang di fora bilateral, Direktorat Perundingan Bilateral melakukan penjajakan perundingan ke negara-negara non tradisional serta terus melanjutkan berbagai perundingan dan kerja sama dengan negara mitra yang masih belum selesai. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selama tahun 2024 telah memberikan kontribusi dalam bentuk 2 perjanjian perdagangan yaitu perjanjian Indonesia - United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) dan Indonesia-Korea CEPA. selain itu penyelesaian secara substansi dalam perjanjian bilateral adalah Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

Dengan disepakati dan diberlakukannya beberapa perjanjian tersebut, Direktorat Perundingan Bilateral memiliki peran yang signifikan dalam mendukung capaian organisasi dan mandat Presiden meningkatkan ekspor melalui pembukaan akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional. Dengan adanya perjanjian perdagangan bilateral kepada negara mitra dagang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekspor Indonesia, menjaga perdagangan dan meningkatkan devisa negara.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Direktorat Perundingan Bilateral meningkatkan perannya dalam negosiasi perjanjian dan kerja sama bilateral dengan negara mitra dagang. Tujuan negosiasi perjanjian dan kerja sama bilateral yang dilakukan mencakup meningkatkan pasar produk ekspor non-migas, optimalisasi upaya pengamanan perdagangan dan Upaya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap hasil-hasil kesepakatan perjanjian perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.


Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025 **“Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika global”**. Upaya yang dilakukan Direktorat Perundingan Bilateral sesuai arahan kebijakan tersebut adalah memperkuat posisi nasional di fora perundingan bilateral. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 - 2024, visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada satu visi di Pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/lembaga harus memiliki Visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan Visi Pemerintah dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian berlandaskan gotong royong” , maka misi pemerintahan periode 2020 - 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- 
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan Internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong Implementasi hasil - hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Perdagangan dan misi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, maka Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan. fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika dan Timur Tengah;

2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerjasama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Afrika dan Timur tengah;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur tengah;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

Keterkaitan atas visi, misi, fungsi Direktorat Perundingan Bilateral kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja yang mencakup dua sasaran kinerja, yaitu :
(i) meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan.

RENCANA KERJA

Sebagai turunan dari rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2024. untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Perundingan Bilateral membagi indikator kinerja menjadi tiga indikator sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Direktur Perundingan Bilateral sebagai berikut:

1. Jumlah perundingan perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral
2. Presentase Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani
3. Presentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral.

Tiga kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran T.A 2024 sebesar Rp. 9.700.000.000 yang kemudian di revisi menjadi Rp. 6.470.228.000 dengan nilai realisasi mencapai 99,55% yaitu sebesar Rp. 6.441.324.819.

Tabel 2. Kegiatan Direktorat Perundingan Bilateral

Indikator Kinerja	Target Kinerja
Jumlah perundingan perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	7 Perundingan
Presentase Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	100 Persen
Presentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral.	85 Persen
Jumlah Anggaran Awal	Rp. 9.700.000.000
Jumlahn Anggaran setelah Penghematan	Rp. 6.470.228.000
Total Realisasi anggaran	Rp. 6.441.324.819

Sumber: Perkin DPB (2024)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Bilateral dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntrabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Direktorat Perundingan Bilateral tahun 2024, di mana secara keseluruhan terdapat 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 NOMOR : PR.02.01/01/PPI.5/PERKIN/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johni Martha
Jabatan : Direktur Perundingan Bilateral

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Johni Martha

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024

Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN BILATERAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil	Jumlah perundingan perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	Perundingan	7
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	Persentase	100
		Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	Persentase	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Bilateral



Jonni Martha

Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan Renstra Ditjen PPI 2020-2024 dan perjanjian kinerja pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Bilateral menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang akan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja tahun 2024 juga dilakukan dengan membandingkan target yang seharusnya dicapai dengan realisasinya.

Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil

Tabel 3. Realisasi dan capaian indikator kinerja 1 tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perundingan perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	7	11	157,14 %
Kinerja Tahun 2023	7	14	200%

Pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Bilateral melaksanakan 7 negosiasi dengan negara mitra dagang. Target indikator 1 berhasil dicapai dengan realisasi pelaksanaan negosiasi sebanyak 11 perundingan dengan capaian 157,14%. Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{11}{7} \times 100\% = 157,14\%\end{aligned}$$

Perundingan Perdagangan Bilateral Tahun 2024

Pada tahun 2024 Direktorat Perundingan Bilateral melaksanakan target kinerja memperluas akses perdagangan internasional Indonesia dengan melakukan berbagai negosiasi bilateral dengan negara mitra dagang. Perkembangan perundingan yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Indonesia - Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA)

Pada tahun 2024, perundingan Indonesia-Tunisia (IT-PTA) telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) putaran perundingan dan 11 (sebelas) pertemuan intersesi serta berhasil menyelesaikan pembahasan teks utama (*Trade in Goods*) dan teks *Rules of Origin* (ROO). Pada pertemuan *Chief Negotiator* (CN) Agustus 2024, kedua pihak juga telah berhasil menuntaskan pembahasan isu akses pasar dan mencapai kesepakatan terkait komitmen liberalisasi 249 pos tarif (PT). Pada tanggal 30 Agustus 2024 tim legal kedua negara telah melaksanakan pertemuan virtual *legal scrubbing* terhadap teks IT-PTA sebagai bagian dari persiapan penandatanganan perjanjian. Namun, pada pertemuan kedua *legal scrubbing* tanggal 6 September 2024, Tunisia mengusulkan paragraf baru terkait *Product Specific Rules* (PSR) sebagian bagian dari *Annex ROO*.

Menanggapi usulan Tunisia, Pemri menyampaikan usulan *Side Letter* melalui nota diplomatik tertanggal 16 Oktober 2024. Namun, Tunisia menolak usulan Indonesia. Pertemuan Intersesi ke-6 Perundingan IT-PTA yang dilaksanakan pada 17-19 April 2024 di Tangerang, Banten. Pada pertemuan ini, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha. Sedangkan, Delegasi Tunisia dipimpin *Director General of Economic and Commercial Cooperation at the Ministry of Trade and Export Development of the Republic of Tunisia*, Lazhar Bannour. Penuntasan perundingan IT-PTA, pada CN meeting 13 Desember 2024, kedua negara sepakat untuk menyusun PSR khusus produk tekstil dan garmen. Kedua negara menargetkan IT-PTA dapat ditandatangani oleh Menteri Perdagangan dari kedua negara pada Q1 tahun 2025



Gambar 4. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024

2. Indonesia - Jordania Preferential Trade Agreement (IJ-PTA)

Pada tahun 2024, Indonesia memiliki kesepakatan untuk melakukan perundingan dengan Jordania. Diawali dengan melaksanakan *Technical Meeting* Indonesia - Jordan PTA pada tanggal 13 Maret 2024. Pemri telah menyampaikan Draft TOR dan *Indicative Schedule of Negotiations* kepada pihak Yordania pada 13 Maret 2024. Namun, melalui surel tanggal 27 Maret 2024, pihak Yordania menyampaikan bahwa mereka masih perlu diskusi internal untuk membahas TOR dan timeline penyelesaian perundingan usulan Indonesia.

3. Indonesia - Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA)

Pada tahun 2024, beberapa upaya penyelesaian kerja sama antara Indonesia dengan Bangladesh melalui negosiasi dan pertemuan teknis dengan Bangladesh untuk membahas posisi kedua negara terkait *request* prioritas Bangladesh untuk produk garmen. Selanjutnya secara paralel, Menteri Perdagangan telah bersurat kepada Presiden RI pada tanggal 28 Maret 2024 untuk meminta arahan penyelesaian perundingan IB-PTA.

Dalam Rapat Terbatas Kabinet untuk membahas permasalahan industri tekstil tanggal 24 Juni 2024, Presiden RI mengindikasikan bahwa perundingan IB-PTA dapat dihentikan karena terkait keberlangsungan industri tekstil dalam negeri, dimana Indonesia tidak dapat mengakomodasi kepentingan Bangladesh untuk produk garmen. Direktorat Perundingan Bilateral telah melaksanakan rapat bersama Kementerian/Lembaga dan asosiasi terkait pada 3 Oktober 2024. Rapat menyambut baik arahan penghentian perundingan IB-PTA untuk mendukung upaya pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pasca pandemi dan peningkatan kemampuan industri TPT nasional. Posisi final Pemerintah Indonesia tersebut akan disampaikan kepada Bangladesh menunggu arahan pimpinan Kementerian Perdagangan.



Gambar 5. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2024

4. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

Pada tahun 2024, perundingan Indonesia - Canada CEPA terus berlanjut. Perundingan dilaksanakan secara *Hybrid* dan bergantian untuk tempat pelaksanaannya. di Ottawa, Canada dan beberapa kota di Indonesia. Putaran ke-10 Indonesia - Canada CEPA dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 4 - 8 November 2024 di Bandung. Putaran ke-10 merupakan putaran akhir ICA-CEPA. Kesepakatan substantif yang dicapai dalam putaran ke-10 terdiri 13 isu runding sehingga seluruh isu runding sejumlah 23 isu runding telah disepakati. Kedua kepala negara telah mengumumkan Penyelesaian Substansif Indonesia-Canada CEPA pada pertemuan bilateral di sela-sela KTT-APEC tanggal 15 November 2024 di Lima, Peru. Penyelesaian ini mencakup 23 (dua puluh tiga) Isu Runding, beberapa diantaranya: perdagangan barang, jasa, investasi, pengaturan asal barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Kedua negara telah melaksanakan penandatanganan *Joint Ministerial Statement of the Substantive Conclusion of Indonesia - Canada CEPA* yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada pada tanggal 2 Desember 2024 di Jakarta. Saat ini sedang dalam tahap *legal scrubbing* untuk seluruh teks perjanjian yang telah disepakati antara pihak Indonesia dengan pihak Kanada. Kedua Menteri Perdagangan sepakat untuk penandatanganan ICA-CEPA dilaksanakan pada semester 1 tahun 2025.



Gambar 6. Perundingan ke 10 Indonesia - Canada CEPA, Bandung 2-8 November 2024



Gambar 7. Opening Plennary Indonesia - Canada CEPA

5. Indonesia - Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement

Pada tahun 2024, perundingan Indonesia - Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) telah dilaksanakan sebanyak empat putaran. Putaran Keempat dilaksanakan pada 28 Oktober -1 November 2024 secara fisik di Jakarta. Pada pembahasan teks, 9 dari total 13 bab telah disepakati. Bab yang belum selesai diantaranya adalah *Rules of Origin*, *Customs Procedure and Trade Facilitation*, *Trade Remedies* dan *Dispute Settlement*. Pembahasan akses pasar, kedua pihak telah melakukan pertukaran *revised offer* pada 5 November 2024 Indonesia telah memberikan *offer* kepada Peru sebesar 92,03% dari total tarif Indonesia dengan nilai sebesar 98,27% dari total nilai impor Indonesia dari Peru. Peru baru memberikan *offer* kepada Indonesia sebesar 90,63% dengan cakupan nilai impor Peru dari Indonesia sebesar 83,1%. Pada pembahasan *Product Specific Rules* (PSRs), kedua pihak baru menyepakati 1605 lines (28,6%) dari total 5602 lines. WG ROO akan menyelenggarakan pertemuan intersesi secara intensif sekali seminggu untuk menyelesaikan PSR. Penyelesaian substansial ditargetkan pada Kuartal I 2025 dan perundingan putaran berikutnya dilaksanakan antara April atau Mei 2025.



Gambar 8. Perundingan Indonesia - Peru CEPA

6. Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU - CEPA)

Selama tahun 2024, Telah dilaksanakan Putaran ke-19 IEU-CEPA pada tanggal 1-5 Juli 2024 di Bogor, Indonesia. Perundingan ini merupakan Putaran penuh terakhir. Setelahnya, seluruh isu runding difinalisasi secara paralel di tingkat *Chief Negotiators* (CNs) dan di tingkat *Working Groups*. Secara umum, 86% teks perjanjian IEU-CEPA telah disepakati dan perundingan akses pasar barang, jasa, investasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/PBJP telah memasuki tahap finalisasi. Perundingan IEU-CEPA ditargetkan selesai secara substansial pada tahun 2025. pada tahun 2025, direncanakan akan dilaksanakan pertemuan di tingkat *Chief Negotiators* (CNs) dan teknis (*working groups*/WG). WG yang melakukan perundingan intersesi, antara lain WG *Investment* WG on *Car Annex*, WG on *Energy and Raw Material* dan WG on *Rules of Origin* terkait teks *Chapter ROO* dan *Product Specific Rules* (PSR).



Gambar 9. Perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU - CEPA)

7. Indonesia - EAEU Free Trade Agreement (IEAEU-FTA)

Di Tahun 2024, Perundingan Indonesia - EAEU FTA masih terus berlangsung. Perundingan putaran ke-5 telah dilaksanakan pada 22-24 Juli 2024 di Malang, Indonesia. Hingga saat ini, telah dituntaskan pembahasan sebanyak 14 dari total 15 Chapter dalam teks perjanjian, teks yang belum selesai adalah *Chapter on Trade Remedies*. Dalam pembahasan akses pasar, kedua pihak telah melanjutkan pembahasan dengan pendekatan pertukaran paket penyelesaian akses pasar barang. Saat ini Indonesia tengah menunggu tanggapan EAEU untuk usulan paket penyelesaian yang telah dikirimkan pada 27 Desember 2024. Perundingan IEAEU-FTA ditargetkan selesai secara substansial pada Semester I tahun 2025.



Gambar 10. Putaran ke 5 Indonesia - EAEU, Pada Juli 2024, Malang Jawa Timur

8. Indonesia - Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL-PTA)

Selama tahun 2024, Perundingan antara Indonesia - Sri Lanka terus dilakukan. Pertemuan kedua TNC ISL-PTA telah dilaksanakan pada 15-16 Juli 2024 di Colombo, Sri Lanka. Agenda pertemuan kedua TNC ISL-PTA adalah penandatanganan ToR perundingan, penyesuaian *workplan* dan *timeline* perundingan, pembahasan teks perjanjian (*draft text* ISL-PTA dan *Annex on Rules of Origin* (ROO) serta *Operational Certification Procedures* (OCP), serta pembahasan akses pasar (modalitas dan *initial request/offer list*). Sebanyak 11 pasal telah disepakati dan 14 pasal akan dibahas lebih lanjut (6 pasal di antaranya secara substansi telah disepakati dan memerlukan konfirmasi K/L terkait)

Perkembangan perundingan:

- *Draft text* ISL-PTA: telah disepakati 11 pasal dan 14 pasal lainnya akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya.
- *Annex on ROO and OCP*: kedua pihak telah saling bertukar pandangan terkait *draft text* tersebut dan akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya.
- Akses pasar: pertukaran *revised request list* telah dilaksanakan pada 8 Agustus 2024. Pertukaran *initial offer list* semula dijadwalkan pada 26 Agustus 2024 namun hingga saat ini belum terlaksana karena ketidaksiapan penyusunan *offer* kedua negara.

Pertemuan ketiga TNC ISL-PTA semula dijadwalkan di Jakarta pada 2-3 September 2024, namun ditunda pelaksanaannya hingga 2025 menunggu selesainya masa transisi pemerintahan baru kedua negara.



Gambar 11. Perundingan Indonesia - Srilanka PTA

9. Indonesia - Gulf Cooperation Country Free Trade Agreement (I-GCC FTA)

Pada Juli 2024, perundingan antara Indonesia - GCC resmi diluncurkan. Hal ini tentunya menjadi awal yang baik untuk langkah kedepannya. Perundingan Putaran Pertama Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (IGCC-FTA) telah dilaksanakan pada 9-12 September 2024 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Johni Martha, Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan, sedangkan delegasi GCC dipimpin oleh Mr. Raja Munahi ALMarzoqi, *General Coordinator for Free Trade Agreements Negotiations*. Perundingan Putaran Pertama I-GCC FTA terbagi ke dalam 10 (sepuluh) pembahasan isu runding, yaitu: *Trade in Goods (TIG)*, *Trade in Services*, *Digital Trade*, *Rules of Origin*, *Custom Procedures and Trade Facilitation*, *Islamic Economy*, *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*, *Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Trade Remedie* dan *Investment*.

Perundingan Putaran Pertama I-GCC FTA telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Fleksibilitas dan komitmen yang tinggi antara kedua negara patut diapresiasi, terutama dalam menindaklanjuti kesepakatan penyelesaian perundingan I-GCC FTA dalam jangka waktu maksimal 24 bulan.



Gambar 12. Peluncuran Perundingan Indonesia - GCC, Juli 2024 di Jakarta



Gambar 13. Perundingan Putaran pertama Indonesia - GCC FTA 9-12 September, di Jakarta

10. Committee on TIG Indonesia - Australia CEPA

Pertemuan Committee on Trade in Goods IA-CEPA telah dilaksanakan pada 7 Agustus 2024. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral bersama dengan Mr. John Watts, *Assitant Secretary, FTA Goods Branch, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*. Kedua pihak membahas kinerja perdagangan Indonesia dan Australia pasca implementasi IA-CEPA, yang mengindikasikan terdapat peningkatan ekspor Australia ke Indonesia untuk produk bahan baku penolong. Hal ini menandakan bahwa IA-CEPA mendukung Indonesia menjadi basis produksi (*economic powerhouse*). Pertemuan juga membahas hasil kajian Katalis terkait Utilisasi Preferensi IA-CEPA dan AANZFTA.

Hasil kajian menunjukkan utilisasi IA-CEPA masih lebih rendah dibandingkan dengan AANZFTA, meskipun tercatat adanya pergeseran penggunaan skema AANZFTA ke IA-CEPA untuk produk daging, hortikultura, serta besi baja. Pertemuan sepakat menugaskan Katalis melakukan update kajian dengan basis data terbaru serta memperluas cakupan studi pada perdagangan jasa, investasi, serta *economic powerhouse*.



Gambar 14. Committee on TIG Indonesia - Australia CEPA

11. Joint Comittee Meeting (JCM) Indonesia - UAE CEPA

Pertemuan Joint Comittee Meeting Indonesia - UAE CEPA dilakukan pertama kali pada 17 Oktober 2024 secara virtual. Pertemuan membahas beberapa isu implementasi yang didiskusikan di tingkat Komite teknis yakni Komite Perdagangan Barang, Komite Kerja Sama Ekonomi, Komite Ekonomi Islam dan Komite *Trade Remedies*. Indonesia dan UAE sepakat untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan pemanfaatan IUAE-CEPA dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada para pelaku usaha. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan proses notifikasi IUAE-CEPA ke WTO.



Gambar 15. Joint Comittee Meeting (JCM) Indonesia - UAE CEPA

Penyelesaian pelimpahan Dokumen Ratifikasi yang dilakukan DPB pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

Ratifikasi Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement

Merujuk pada surat dari DPR RI nomor T/472/PW.11.01/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, disepakati bahwa II-PTA akan diratifikasi melalui instrumen pengesahan Peraturan Presiden.

Ratifikasi Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (IM-BTA)

- BTA 2023 akan disahkan menggunakan Perpres. Rencana penyusunan Perpres telah tercantum dalam Keppres 4/2024 tentang Program Penyusunan Perpres 2024.
- Telah dilakukan rapat finalisasi dokumen ratifikasi IM-BTA tanggal 16 Mei 2024 yang selanjutnya Sesditjen PPI akan meminta paraf persetujuan seluruh anggota PAK pada dokumen yang telah disepakati.
- Kemendag akan menyampaikan surat permohonan harmonisasi dokumen yang telah disepakati anggota PAK kepada Kemenkumham.

Protokol Perubahan Indonesia - Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Protokol Perubahan IJEPA diselesaikan secara substansi pada 16 Desember 2023. Indonesia dan Jepang melakukan proses *legal scrubbing* pada semester I tahun 2024. Protokol Perubahan IJEPA ditandatangani pada 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Jepang.



Gambar 16. Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA, 8 Agustus 2024, secara Daring

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral

Focus Group Discussion mengenai pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral sektor kelapa sawit

Focus Group Discussion dilaksanakan pada 17 Mei 2024 secara *hybrid* dan dihadiri oleh perwakilan K/L teknis yakni Kemendag (Ditfas, Dit. P2IE) dan Kementan (Dit. P2HP) serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI); PT Astra Agro Lestari (AALI), PT Musim Mas, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART), PT Wilmar Internasional, First Resources, dan PT Dua Kuda Indonesia. FGD bertujuan untuk mensosialisasikan komitmen yang didapatkan Indonesia untuk sektor sawit dalam 8 (delapan) perjanjian dagang bilateral. FGD juga sekaligus mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dialami pelaku usaha atas implementasi perjanjian dagang bilateral tersebut. Saat ini DPB akan mengoptimalkan pemanfaatan FTA/CEPA melalui kegiatan konsultasi publik implementasi perjanjian secara targeted, tematik dan sektoral. Kami juga menyampaikan penawaran program kemitraan dengan asosiasi dan pelaku usaha berupa dukungan substansi hasil perundingan dan narasumber, maupun coaching clinic yang nantinya akan bekerja sama dengan Ditfas.



Gambar 17. FGD pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral sektor Kelapa Sawit, 17 Mei 2024, Tangerang Selatan

Focus Group Discussion mengenai pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral sektor kertas dan pulp

FGD dilaksanakan pada 26 Juni 2024 secara hybrid di Bandung yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan eksportir pulp dan kertas; Asosiasi Pulp dan Kertas (APKI), KADIN Jawa Barat, KADIN Kota Bandung, FTA *Support Center* Bandung dan Kementerian Perindustrian. FGD bertujuan mensosialisasikan komitmen yang didapatkan Indonesia untuk sektor pulp dan kertas dalam 8 (delapan) perjanjian dagang bilateral. FGD juga sekaligus untuk mendapatkan masukan terkait kendala atau hambatan yang dialami pelaku usaha atas implementasi perjanjian dagang bilateral tersebut. Saat ini DPB akan mengoptimalkan pemanfaatan FTA/CEPA melalui kegiatan konsultasi publik implementasi perjanjian secara targeted, tematik dan sektoral. Kami juga menyampaikan penawaran program kemitraan dengan asosiasi dan pelaku usaha berupa dukungan substansi hasil perundingan dan narasumber, maupun *coaching clinic*.



Gambar 18. FGD pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral sektor Kertas dan Pulp, Juni 2024 di Bandung

Konsultasi Publik pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral

Dalam rangka mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan perdagangan bilateral oleh para pelaku ekspor Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Direktorat Perundingan Bilateral bekerja sama dengan Dina Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Konsultasi Publik dengan tema “Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Bilateral dalam Upaya Peningkatan Ekspor Indonesia” di Medan, Sumatera Utara pada 19 Juli 2024.

Kegiatan dilaksanakan secara *Hybrid* dan dihadiri oleh para pelaku ekspor Kota Medan, beberapa perwakilan unit Kementerian Perdagangan, Disperindag ESDM Provinsi Sumatera Utara, dan FTA *Support Center* Bandung. Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi penyumbang nilai ekspor terbesar di wilayah Sumatera. Ekspor Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, tembakau, kayu dan kopra. merujuk data utilisasi SKA Provinsi Sumatera Utara, masih terdapat pelaku usaha yang belum menggunakan tarif preferensi yang ditawarkan oleh sejumlah persetujuan dagang yang telah dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh masih kurangnya informasi serta adanya kendala teknis dalam memanfaatkan tarif preferensi tersebut.



Gambar 19. Konsultasi Publik pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral, di Kota Medan

KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, Direktorat Perundingan Bilateral memiliki anggaran awal sebesar Rp. 9.700.000.000,-. Namun dengan adanya arahan untuk melakukan revisi anggaran sehingga anggaran Direktorat Perundingan Bilateral menjadi Rp. 6.470.228.000. Untuk mendukung capaian kinerja yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DPB telah merealisasikan anggaran sebesar 99,55% atau sekitar Rp. 6.441.324.819,-. Berikut ini penjabaran realisasi dari masing-masing indikator kinerja:

Tabel 4. Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Bilateral 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Presentase
1	Jumlah Negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	8.593.438.000	6.112.227.000	6.085.502.015	99,57%
2	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	193.398.000	46.191.000	44.266.000	95,83%
3	Presentase Pemahaman Pemangku Kepentingan terkait Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	913.164.000	311.810.000	311.556.804	99,92%
Total		9.700.000.000	6.470.228.000	6.441.324.819	99,55%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi anggaran dari seluruh indikator kinerja DPB memiliki realisasi sebesar 99,55%. dengan urutan realisasi anggaran di posisi pertama sebesar 99,92% atau senilai Rp. 311.556.804 untuk Indikator Kinerja Presentase Pemahaman Pemangku Kepentingan terkait Hasil Perundingan Perdagangan Internasional. dilanjutkan dengan posisi kedua sebesar 99,57% atau senilai Rp. 6.085.502.015 untuk Indikator Kinerja Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral. Dan di posisi ketiga sebesar 95,83% senilai Rp. 44.266.000,- untuk Indikator Kinerja Penyelesaian Pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani.

BAB IV

PENUTUP

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2024 yang telah diperjanjikan, kinerja Direktorat Perundingan Bilateral pada tahun 2024 dapat dikatakan SANGAT BAIK dan MEMUASKAN karena seluruh indikator kinerja telah memiliki capaian lebih dari 100%, bahkan ada capain kinerja yang jauh melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu pak IK-1 jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral dengan dilaksanakannya 11 Perundingan Bilateral dengan negara mitra dagang sepanjang tahun 2024.

Pada tahun 2024 rata-rata capaian dari 3 (tiga) indikator Kinerja adalah 119,22%, hal ini tentunya melebihi dari target yang telah diperjanjikan. Pada sisi kinerja anggaran, pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Bilateral mengalami peningkatan dari sisi anggaran sebesar 99,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 90,52%.

REKOMENDASI

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 agar dapat dilakukan pengoptimalan rincian output (RO). lebih teliti dan cermat dalam menetapkan strategi pencapaian target kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan faktor lainnya seperti perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Meskipun penyusunan rencana pelaksanaan program atau kegiatan telah dilakukan dengan cukup cermat, namun adanya *automatic adjustment* anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap program/kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Perundingan Bilateral, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja yang sesuai anggaran setelah *automatic adjustment*. dan dengan adanya pengoptimalan RO, pada triwulan IV diharapkan pengotimalan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja, agar dari masing-masing indikator yang ditetapkan perlu adanya pemantauan pencapaian target secara periodik/triwulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan perlu dilakukannya tindakan preventif dengan pengoptimalan manajemen risiko sehingga setiap pelaksanaan program/kegiatan dari target kinerja per indikator kinerja dapat terpantau dengan baik. Dengan dilakukan tindakan proaktif manajemen risiko diharapkan pada akhir tahun anggaran capaian kinerja seluruh indikator kinerja dapat tercapai jauh melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.



LAPORAN KINERJA 2024

**Presented By
Direktorat Perundingan Bilateral**

Direktorat Perundingan Bilateral
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Gambir
Jakarta Pusat
Gedung 2 Lt. 8
Telp.021-3442576
Email : ditperundinganbilateral@gmail.com

